



LAPORAN SINGKAT **KOMISI I DPR RI**

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

- Rapat ke : 38 (tiga puluh delapan)
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)/ke-5
- Hari, Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2016
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Masukan para Dirjen terkait proses pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Strait of Singapore*)
- Hadir : 1. orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Ferry Adamhar, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu
b. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, M. Hum, Dirjen Peraturan Perundangan-Undangan Kemenkum dan HAM
c. Dirjen Perhubungan Laut, diwakili oleh Dir. Kenavigasian, Ditjen Hubla Kemenhub, Ir. Bambang Wiryanto
d. Mayjen TNI Dr. Yudi Swastanto, Dirjen Strahan Kemenhan

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan Dirjen Strahan Kemenhan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P.

II. CATATAN

Komisi I DPR RI telah mendengarkan masukan dan pandangan dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan Dirjen Strahan Kemenhan terkait dengan RUU tentang Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura. Selanjutnya, masukan dan pandangan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura dengan Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 4 Oktober 2016

KETUA RAPAT,

TTD

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.

A-486